



**ANALISIS PEMERIKSAAN OPERASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN
STANDAR OPERASI PROSEDUR PERSETUJUAN KREDIT
(Study kasus pada Koperasi Kredit Padat Asih tahun 2007-2009)**

**Oleh
Ngadi Permana
Ardhie Indrawan**

ABSTRAK

Salah satu penyebab terjadinya krisis global pada tahun 2008 adalah karena tidak berjalannya fungsi pemeriksaan intern baik dalam lembaga keuangan maupun bank yang memberikan kredit perumahan kepada para debitur. Maka dari itu diperlukan fungsi pemeriksaan intern yang baik untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan persetujuan kredit khususnya pada pemeriksaan operasional. Hal ini penting karena pelaksanaan yang sesuai dengan standar operasi dan prosedur akan lebih mengurangi resiko gagal bayar. Lembaga keuangan harus memperhatikan kelayakan para kreditur, tetapi di sisi lain lembaga tersebut juga harus bisa menyalurkan dana yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh pemeriksaan operasional terhadap pelaksanaan standar operasi dan prosedur, pengaruh pemeriksaan operasional terhadap standar operasi dan prosedur persetujuan kredit, dan pengaruh pemeriksaan operasional terhadap efektifitas pelaksanaan kredit. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan riset dokumen (*Content Analysis*) dalam menganalisa dokumen-dokumen persetujuan kredit yang ada di Koperasi Padat Asih pada tahun 2007-2009. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tingkat kredit macet tahun 2007 sebesar 1,96%, (2) Tahun 2008 sebesar 1,55%, dan (3) Tahun 2009 sebesar 0,81%. Pemeriksaan operasional memberikan pengaruh yang baik bagi pelaksanaan standar operasi dan prosedur berdasarkan menurunnya tingkat kredit macet yang terjadi. Pemeriksaan operasional tidak memberikan pengaruh terhadap standar operasi dan prosedur persetujuan kredit berdasarkan tidak adanya perubahan yang terjadi dalam standar operasi dan prosedur persetujuan kredit. Pemeriksaan operasional memberikan pengaruh yang baik terhadap efektifitas pelaksanaan kredit berdasarkan menurunnya tingkat kredit macet yang terjadi.

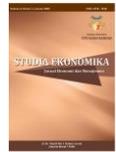
Kata kunci: Pemeriksaan intern, Pemeriksaan operasional, Standar operasi dan prosedur persetujuan kredit

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis global menimpa hampir seluruh negara di dunia pada tahun 2008. Tidak hanya negara-negara miskin dan berkembang yang menjadi korban seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang lalu. Namun negara-negara maju diseluruh belahan dunia ikut pula merasakan dampak dari krisis ekonomi ini di negara mereka, tak terkecuali negara-negara maju di belahan Eropa, Asia dan Amerika.

Menurut Khomeiny Yunior saat ini kondisi perekonomian yang khususnya dalam dunia perbankan tengah mengalami krisis, dimana salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit macet sebagai akibat dari pengelolaan kredit yang kurang baik. Oleh karena itu sistem pemeriksaan intern terhadap



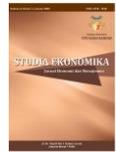
pemberian kredit menjadi suatu hal yang sangat penting terlebih jika ditunjang oleh adanya pemeriksaan intern.

Dampak negatif krisis global di Indonesia sendiri adalah menurunnya kinerja neraca pembayaran dari Amerika dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Dengan terjadinya krisis ini, maka kita perlu memikirkan alternatif lain selain dari sistem ekonomi kapitalis yang cukup berkembang di Indonesia. Salah satu potensi yang harusnya mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah koperasi. Koperasi dapat membantu masalah permodalan usaha kecil dan menengah terutama bagi anggotanya. Masalah yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Hal ini harus mendapat perhatian yang sangat serius karena dari sinilah kegiatan ekonomi riil dapat berkembang.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya risiko yang timbul dalam pemberian kredit. Untuk mengurangi kemungkinan kredit macet yang terjadi kepada debitur maka prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan baik. Untuk menunjang prinsip kehati-hatian ini maka diperlukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perkreditan yaitu dengan dibentuknya suatu badan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam pemberian kredit. Kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama dari lembaga-lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam. Di satu sisi koperasi sebagai lembaga keuangan harus memperhatikan kemampuan debitur membayar hutangnya dan tingkat pengembalian piutang yang ada agar tidak terjadi kerugian akibat gagal bayar. Di sisi lain koperasi sebagai lembaga keuangan juga harus memberikan kredit sebanyak-banyaknya kepada debitur agar dana yang terhimpun mendapatkan pengembalian/ keuntungan dalam bentuk bunga/sisa hasil usaha.

Seperti dijelaskan diatas, pada dasarnya krisis ekonomi yang terjadi diawali dengan tidak berjalannya fungsi Internal Audit dalam lembaga keuangan ataupun bank yang memberikan kredit perumahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya debitur-debitur yang tidak memenuhi syarat namun tetap mendapatkan kredit. Pemeriksaan internal dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional dari pemberian kredit kepada debitur. Apakah debitur memiliki keadaan keuangan dan kemampuan yang cukup untuk membayar hutangnya. Kebutuhan akan pemeriksaan internal ditentukan oleh bagaimana kebijakan manajemen. Tujuan utama pemeriksaan internal adalah untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen perusahaan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, serta memberikan informasi kepada manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemikiran dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen persetujuan kredit yang ada pada lembaga keuangan (Koperasi simpan pinjam), untuk dilakukan pengecekan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan standar operasi dan prosedur. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat penelitian tentang pemeriksaan akuntansi dengan judul "**Analisis Pemeriksaan Operasional terhadap Pelaksanaan Standar Operasi Prosedur Persetujuan Kredit (study kasus pada Koperasi Kredit Padat Asih tahun 2007-2009)**". Karena penulis mempertimbangkan bahwa pengendalian internal terhadap pemberian kredit memiliki posisi penting dalam aktivitas usaha suatu lembaga keuangan.



Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang ditetapkan berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan operasional mempengaruhi pelaksanaan standar operasi dan prosedur persetujuan kredit?
2. Bagaimana pemeriksaan operasional mempengaruhi standar operasi dan prosedur persetujuan kredit?
3. Bagaimana pemeriksaan operasional mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kredit?

Tinjauan Pustaka

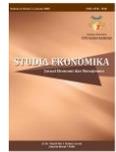
Tugas dan tanggungjawab pengawas

Menurut anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Padat Asih, pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan memeriksa surat-surat berharga, uang kas (kas opname), buku-buku catatan keuangan, laporan keuangan, dan dokumen penting lainnya.
2. Sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan memeriksa surat permohonan dan perjanjian pinjaman guna meyakinkan bahwa segala sesuatunya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan mengadakan rapat intern pengawas guna memastikan bahwa tugas-tugas kepengawasan sudah berjalan dengan baik.
4. Menyusun dan memelihara notulen rapat pengawas
5. Menghadiri rapat gabungan dengan pengurus
6. Sekurang-kurangnya sekali dalam 12 bulan memeriksa buku anggota dan mencocokkan dengan kartu pinjaman dan pinjaman anggota (KSPA) serta daftar saldo simpanan dan pinjaman.
7. Menampung, meneliti, dan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh anggota dan dibawa kedalam rapat gabungan.
8. Membuat catatan-catatan pada buku catatan pengawas atas temuan yang diperoleh didalam menjalankan pemeriksaan serta saran-saran jika dipandang perlu.
9. Mengevaluasi kinerja pengurus.
10. Meninjau lanjut keluhan dari anggota
11. Melaporkan hasil temuan serta memberi saran atau usulan kepada pengurus dalam rapat gabungan
12. Selambat-lambatnya tujuh hari sesudah tutup buku, mengadakan pemeriksaan menyeluruh berikut analisis-analisis dan penilaian kesehatan, kemudian dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
13. Mengusulkan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa bila ditemukan penyimpangan yang merugikan koperasi.

Pengertian audit manajemen menurut IBK Bayangkara adalah

Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan. Manajemen disini meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggung jawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari



entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan audit manajemen

menurut IBK Bayangkara Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, disamping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan. Sebab dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, suatu badan usaha ataupun perorangan yang memberikan fasilitas kredit memiliki kepercayaan bahwa suatu saat si penerima kredit akan sanggup memenuhi segala kewajibannya yang telah ditetapkan kepadanya.

Dalam pemberian kredit ada dua pihak yang memiliki kepentingan langsung yaitu pemberi kredit (kreditur) dalam hal ini Koperasi Padat Asih dan penerima kredit (debitur) yaitu anggota koperasi padat asih yang telah memenuhi persyaratan ataupun pihak lain yang berkepentingan untuk meminjam dana dari koperasi padat asih. Bilamana terjadi perjanjian pemberian kredit antara pihak koperasi padat asih dan pihak anggota koperasi maka akan dibuat kesepakatan kredit mengenai jumlah pinjaman yang diberikan, lama pembayaran pinjaman, jumlah bunga yang harus dibayar dan ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan perjanjian tersebut.

Pengertian kredit menurut Tjoekam:

“Kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomis kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomis yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.”

Sedangkan menurut undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.”

Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti : **Rahmatuloh Husnie Rhamdani**
Tahun : 2012
Judul : Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Intern terhadap Efisiensi Biaya Produksi
Sumber : Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Variabel : Biaya produksi, audit operasional, dan pengendalian internal
Hasil : Audit operasional dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya produksi



Nama Peneliti : **Euis Rosidah & Prihady Munandar**
Tahun : 2008
Judul : Peranan Audit Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern atas Biaya Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan(TM) Komoditi Teh
Sumber : Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Variabel : Peranan audit operasional &Pengendalian Intern atas Biaya Pemeliharaan Tanaman (TM)
Hasil : Audit operasional atas Pengendalian Intern Biaya Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan di PT Perkebunan Nusantara VIII unit usaha Cisaruni sudah memadai dan berjalan sebagaimana mestinya

Nama Peneliti : **Divianto**
Tahun : 2012
Judul : Peranan Audit Operasional Terhadap Efektifitas Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Di Rumah Sakit (Studi Kasus pada Rumah Sakit Bunda Palembang)
Sumber : Universitas Sriwijaya Palembang
Variabel : Audit operasional dan efektivitas pelayanan kesehatan Rawat Inap
Hasil : Peranan Audit operasional pada Rumah Sakit Bunda Palembang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap pada rumah sakit tersebut dengan signifikansi F_{hitung} sebesar 523.306 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien determinasi sebesar 0.861 atau 86.1%

METODE

Metodologi Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan operasional pemberian kredit dengan tujuan meminimalkan resiko terjadinya kredit macet. Aspek-aspek yang akan diuraikan meliputi:

1. Pengolahan data dari alat-alat analisis seperti kebijakan koperasi kredit Padat Asih terhadap laporan keuangan 2007, laporan keuangan 2008, laporan keuangan 2009. Dalam analisis ini penulis meneliti dan menganalisis data-data pada tahun 2007, 2008, 2009 dengan memperhatikan jumlah kredit macet yang terjadi. Analisis ini digunakan untuk melihat apakah kredit macet yang terjadi semakin sedikit atau sebaliknya.
2. Membuat perbandingan antara standar operasi dan prosedur yang ada dengan realitas operasional yang telah dilakukan pengurus/pengelola kantor Koperasi Kredit Padat Asih. Kemudian memaparkannya secara lebih terinci agar dapat diketahui letak kesalahannya dalam pelaksanaan operasional persetujuan kredit yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam upaya menekan terjadinya kredit macet yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan riset dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efisiensi dari pelaksanaan persetujuan kredit, sehingga jumlah kredit macet dapat ditekan dan keuntungan koperasi dapat meningkat

Pengumpulan Data

Data Koperasi Kredit Padat Asih



Koperasi Kredit Padat Asih berdiri pada bulan April 1977 dengan modal awal sebesar Rp.900.000,- yang didapat dari simpanan pokok Rp.200,- dan simpanan wajib Rp.200,- selama tiga bulan. Nama Padat Asih diambil dari sekolah **PA**x – sekolah **DA**mai – sekolah **T**arsisius dan SLB tri **ASIH**. Karena koperasi Padat Asih awalnya beranggotakan guru dan karyawan dari keempat sekolah tersebut. Yang sekarang bernaung dibawah Yayasan Bunda Hati Kudus (YBHK).

Koperasi Padat Asih telah memiliki Badan Hukum dengan No: 013/BH/PAD/ KDK.9.1./X/1998 pada tanggal 12 Oktober 1998. Saat ini Koperasi Padat Asih memiliki Gedung sendiri sebagai tempat melayani anggotanya yaitu Wisma Padat Asih yang terletak di jalan Perjuangan No.14 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Koperasi Padat Asih saat ini memiliki anggota sebanyak 1184 orang dan memiliki total aset sebesar lebih dari 10 milyar. Kegiatan usaha Koperasi Padat Asih adalah memberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan dalam beberapa bidang yaitu: Kredit Produktif, Kredit Perumahan, Kredit Pendidikan, Kredit Kesejahteraan, Kredit Kesehatan, Kredit Kendaraan Bermotor. Sampai saat ini Koperasi Padat Asih telah menyalurkan kredit lebih dari 45 milyar rupiah kepada anggotanya.

Visi dan Misi Koperasi Kredit Padat Asih

Visi

Menjadi lembaga keuangan terpercaya dan pilihan utama anggota dalam kegiatan simpan pinjam yang mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan serta pengelolaan secara profesional demi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat

Misi

1. Menghimpun simpanan anggota dengan berbagai insentif dan balas jasa yang menarik
2. Memberikan berbagai bentuk pelayanan pinjaman kepada anggota dengan suku bunga yang bersaing
3. Memberikan balas jasa yang menarik bagi anggota yang aktif dalam kegiatan koperasi
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berkoperasi, baik formal maupun non formal
5. Merekrut anggota baru yang potensial dan efektif
6. Menjalani kerjasama dengan lembaga/koperasi lain baik vertikal maupun horizontal dengan prinsip saling menguntungkan
7. Mengupayakan perlindungan yang maksimal terhadap simpanan dan pinjaman anggota
8. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang membina kekeluargaan dan kebersamaan
9. Memberikan bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat
10. Mengembangkan sistem manajemen pelayanan koperasi berbasis IT
11. Memperkuat struktur modal

Tujuan dan sasaran Koperasi Kredit Padat Asih

Tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
2. Menjadikan koperasi kredit Padat Asih sebagai lembaga keuangan yang dipercaya anggota dan masyarakat
3. Menjadikan koperasi kredit Padat Asih sebagai lembaga keuangan pilihan utama anggota
4. Menjadikan koperasi kredit Padat Asih sebagai lembaga investasi yang aman dan menguntungkan
5. Memperkuat kelembagaan koperasi kredit Padat Asih melalui peningkatan peran anggota
6. Menyediakan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan anggota



7. Menumbuhkan spirit wirausaha dalam diri anggota
8. Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat

Sasaran:

1. Terselenggaranya pengelolaan tertib administrasi
2. Terlaksananya fungsi-fungsi manajemen secara baik
3. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang *akuntable*
4. Penyebaran informasi penting berkaitan dengan hasil kegiatan dan rencana melalui berbagai media
5. Tingkat pertumbuhan anggota minimal 15% per tahun
6. Siswa baru di sekolah-sekolah YBHK menjadi "anggota khusus" minimal 25%
7. Pertumbuhan Total Asset mencapai rata-rata 25% per tahun

Susunan Kepengurusan Koperasi Padat Asih

Penasehat:

1. Ketua Yayasan Bunda Hati Kudus:
Bp Drs. Romanus Mujiono, M.Pd.
2. Ketua Puskopdit DKI Jakarta
3. Ka. Sudin Koperasi dan UKM Jakarta Pusat

Pengurus:

- Ketua Umum : Markus Maradu Siboro, SE
Ketua I : Yoakim Deko Lamablawa
Ketua II : Benedictus Waris Nugroho
Sekretaris : Bernardus Bubun Bada
Bendahara : Theresia Keraf

Pengawas:

- Ketua : Antonius Winardi
Sekretaris : Enga Simeon
Anggota : Yoseph Kedang

Manajemen:

- Kepala Kantor : Nurdin Tinambunan
Staff : Lusia Nugrahaningsih
Bernadeta Dyah Puspita
Lia Dewi Wulandari
Dwi Priyono

Prosedur Pemberian Pinjaman

1. Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan menyerahkan ke Panitia Kredit
2. Berdasarkan SPP Panitia Kredit menganalisa (kemampuan pengembalian, jangka waktu, performa/profil anggota, dll) dan menyetujui melalui Surat Persetujuan Pinjaman (SPJ), mengoreksi atau menolak permohonan anggota.
3. Jika disetujui maka meneruskan arsip SPP dan SPJ ke bendahara/manajer untuk diproses lebih lanjut (diatur *cash flow*-nya untuk menentukan kapan dana dapat dicairkan)



4. Bendahara/manajer menyiapkan Surat Perjanjian Pinjaman (SP) dan jika perlu meminta jaminan dari anggota. SPP dan SPJ diarsip oleh bendahara/ manajer.
5. Setelah dana siap, bendahara/manajer menyerahkan SP dan jadwal ke kasir untuk ditindaklanjuti.
6. Kasir meminta anggota menandatangani SP, Slip Uang Keluar (SUK), dan menyerahkan uang ke anggota.
7. Kasir mencatat di BKH, menyerahkan copy 1 ke anggota mengarsip SP dan copy 2 SUK serta dan menyerahkan asli SUK ke akuntansi.

Data kredit macet dan kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah anggota yang lalai dalam melakukan angsuran bulanan selama 2 bulan berturut-turut.

Kredit macet adalah jumlah kredit yang dihapuskan karena tidak bisa ditagih lagi.

Kredit bermasalah tahun 2007 sebesar	Rp. 113.727.361,-
Kredit macet tahun 2007 sebesar	Rp. 108.857.669,-
Kredit bermasalah tahun 2008 sebesar	Rp. 272.670.596,-
Kredit macet tahun 2008 sebesar	Rp. 94.690.596,-
Kredit bermasalah tahun 2009 sebesar	Rp. 22.187.486,-
Kredit macet tahun 2009 sebesar	Rp. 75.561.196,-

Jumlah dokumen yang tidak lengkap

Pada saat pengecekan sampel diketahui jumlah dokumen yang tidak lengkap diisi berjumlah:

Tahun 2007 ada 8 dokumen dari 60 sampel = 13,33%
Tahun 2008 ada 5 dokumen dari 50 sampel = 10%
Tahun 2007 ada 5 dokumen dari 67 sampel = 7,46%

Pengolahan Data

Tingkat kelalaian pengembalian kredit

Tahun 2007

Pinjaman kredit bermasalah	Rp. 113.727.361,-
Kredit macet yang dihapus	Rp. 108.857.669,-
Pinjaman yang direalisasikan	Rp. 5.540.260.550,-

Tingkat Kelalaian

$$= \frac{\text{Rp. 113.727.361}}{\text{Rp. 5.540.260.550}} \times 100\% = 2.05\%$$

Tingkat Kredit Macet

$$= \frac{\text{Rp. 108.857.669}}{\text{Rp. 5.450.260.550}} \times 100\% = 1.96\%$$

Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2007 sebesar 2.05%, sedangkan tingkat kredit macet pada tahun 2007 sebesar 1.96%

Tahun 2008

Pinjaman kredit bermasalah	Rp. 272.670.593,-
----------------------------	-------------------



Kredit macet yang dihapus Rp. 94.690.596,-
Pinjaman yang direalisasikan Rp. 6.121.544.300,-

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kelalaian} \\ &= \frac{\text{Rp. 272.670.593}}{\text{Rp. 6.121.544.300}} \times 100\% = 4.45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kredit macet} \\ &= \frac{\text{Rp. 94.69.596}}{\text{Rp. 6.121.544.300}} \times 100\% = 1.55\% \end{aligned}$$

Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2008 sebesar 4.45%, sedang kan tingkat kredit macet pada tahun 2008 sebesar 1.55%

Tahun 2009

Pinjaman kredit bermasalah Rp. 22.187.486,-
Kredit macet yang dihapus Rp. 75.561.196,-
Pinjaman yang direalisasikan Rp. 9.326.485.524,-

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kelalaian} \\ &= \frac{\text{Rp. 22.187.486}}{\text{Rp. 9.326.485.524}} \times 100\% = 0.24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kredit macet} \\ &= \frac{\text{Rp. 75.561.196}}{\text{Rp. 9.326.485.524}} \times 100\% = 0.81\% \end{aligned}$$

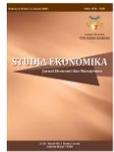
Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2009 sebesar 0.24%, sedangkan tingkat kredit macet pada tahun 2009 sebesar 0.81%

Pelaksanaan Sistem Operasi Prosedur Persetujuan Kredit

Hasil dari pengecekan kelengkapan dokumen dalam persetujuan kredit didapatkan penulis bahwa, semua sampel dokumen yang diperiksa sudah sesuai dengan sistem operasi prosedur.

Sistem operasi prosedur persetujuan kredit:

1. Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan menyerahkan ke Panitia Kredit
Mengecek ada atau tidaknya SPP
2. Berdasarkan SPP Panitia Kredit menganalisa (kemampuan pengembalian, jangka waktu, performa/profil anggota, dll) dan menyetujui melalui Surat Persetujuan Pinjaman (SPJ), mengoreksi atau menolak permohonan anggota.
Mengecek ada atau tidaknya SPJ
3. Jika disetujui maka meneruskan arsip SPP dan SPJ ke bendahara/manajer untuk diproses lebih lanjut (diatur *cash flow*-nya untuk menentukan kapan dana dapat dicairkan)
Mengecek tanggal pembuatan SPJ dan tanggal SP
4. Bendahara/manajer menyiapkan Surat Perjanjian Pinjaman (SP) dan jika perlu meminta jaminan dari anggota. SPP dan SPJ diarsip oleh bendahara/ manajer.
Mengecek ada atau tidaknya SP



-
5. Setelah dana siap, bendahara/manajer menyerahkan SP dan jadwal ke kasir untuk ditindaklanjuti.
Mengecek tanggal pembuatan SP dan tanggal SUK
 6. Kasir meminta anggota menandatangani SP, Slip Uang Keluar (SUK), dan menyerahkan uang ke anggota.
Mengecek ada atau tidaknya SUK
 7. Kasir mencatat di BKH, menyerahkan *copy* 1 ke anggota mengarsip SP dan *copy* 2 SUK serta dan menyerahkan asli SUK ke akuntansi.
Mengecek BKH, arsip SP dan SUK

HASIL PENELITIAN

Analisis

1. Prosedur Pemberian Pinjaman
 - a. Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan menyerahkan ke Panitia Kredit
Semua permohonan anggota yang diperiksa telah mengisi Surat Permohonan Pinjaman. Hanya saja ada beberapa Surat Permohonan Pinjaman yang tidak diisi dengan lengkap seperti tidak diisinya kolom penghasilan (dokumen tahun 2007 & 2008).
 - b. Berdasarkan SPP Panitia Kredit menganalisa (kemampuan pengembalian, jangka waktu, *performance*/profil anggota, dll) dan menyetujui melalui Surat Persetujuan Pinjaman (SPJ), mengoreksi atau menolak permohonan anggota.
Semua permohonan anggota yang diperiksa telah disetujui melalui Surat Persetujuan Pinjaman.
 - c. Jika disetujui maka meneruskan arsip SPP dan SPJ ke bendahara/ manajer untuk diproses lebih lanjut (diatur *cash flow*-nya untuk menentukan kapan dana dapat dicairkan)
Dari pengecekan data tanggal pembuatan Surat Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Pinjaman, dan Slip Uang Keluar diketahui bahwa pencairan dana kredit dilakukan kurang dari 2 hari.
 - d. Bendahara/manajer menyiapkan Surat Perjanjian Pinjaman (SP) dan jika perlu meminta jaminan dari anggota. SPP dan SPJ diarsip oleh bendahara/ manajer.
Semua permohonan anggota yang diperiksa telah memiliki Surat Perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh bendahara/manajer koperasi. Dan semua Surat Perjanjian Pinjaman telah ditandatangani oleh peminjam diatas materai. Semua permohonan anggota yang diperiksa telah memiliki jaminan yang memadai.
 - e. Setelah dana siap, bendahara/manajer menyerahkan Surat Perjanjian Pinjaman dan jadwal ke kasir untuk ditindaklanjuti.
Setelah semua persyaratan dan dana telah siap maka bendahara/manajer menyerahkan Surat Perjanjian Pinjaman ke kasir untuk disiapkan uang yang akan dipinjamkan kepada anggota yang meminjam. Dari pengecekan data tanggal pembuatan Surat Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Pinjaman, dan Slip Uang Keluar diketahui bahwa pencairan dana kredit dilakukan kurang dari 2 hari.
 - f. Kasir meminta anggota menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman, Slip Uang Keluar (SUK), dan menyerahkan uang ke anggota.
Dari hasil pengecekan yang dilakukan penulis diketahui bahwa Surat Perjanjian Pinjaman telah ditanda tangani anggota yang meminjam diatas materai dan Slip Uang Keluar juga telah ditandatangani sebagai bukti bahwa uang telah diterima oleh anggota.



- g. Kasir mencatat di BKH, menyerahkan copy 1 ke anggota mengarsip SP dan copy 2 SUK serta dan menyerahkan asli SUK ke akuntansi.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan penulis diketahui bahwa Buku Kas Harian telah dibuat dengan lengkap. Surat Perjanjian Pinjaman dan Slip Uang Keluar telah diarsip dengan baik.

2. Tingkat kelalaian pengembalian kredit

a. Tahun 2007

Pinjaman kredit bermasalah	Rp. 113.727.361,-
Kredit macet yang dihapus	Rp. 108.857.669,-
Pinjaman yang direalisasikan	Rp. 5.540.260.550,-

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kelalaian} \\ &= \frac{\text{Rp. 113.727.361}}{\text{Rp. 5.540.260.550}} \times 100\% = 2.05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kredit macet} \\ &= \frac{\text{Rp. 108.857.669}}{\text{Rp. 5.450.260.550}} \times 100\% = 1.96\% \end{aligned}$$

Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2007 sebesar 2.05%, sedangkan tingkat kredit macet pada tahun 2007 sebesar 1.96%

b. Tahun 2008

Pinjaman kredit bermasalah	Rp. 272.670.593,-
Kredit macet yang dihapus	Rp. 94.690.596,-
Pinjaman yang direalisasikan	Rp. 6.121.544.300,-

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kelalaian} \\ &= \frac{\text{Rp. 272.670.593}}{\text{Rp. 6.121.544.300}} \times 100\% = 4.45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kredit macet} \\ &= \frac{\text{Rp. 94.69.596}}{\text{Rp. 6.121.544.300}} \times 100\% = 1.55\% \end{aligned}$$

Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2008 sebesar 4.45%, sedangkan tingkat kredit macet pada tahun 2008 sebesar 1.55%

c. Tahun 2009

Pinjaman kredit bermasalah	Rp. 22.187.486,-
Kredit macet yang dihapus	Rp. 75.561.196,-
Pinjaman yang direalisasikan	Rp. 9.326.485.524,-

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat kelalaian} \\ &= \frac{\text{Rp. 22.187.486}}{\text{Rp. 9.326.485.524}} \times 100\% = 0.24\% \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \text{Tingkat kredit macet} \\ &= \frac{\text{Rp. 75.561.196}}{\text{Rp. 9.326.485.524}} \times 100\% = 0.81\% \end{aligned}$$

Jadi tingkat kelalaian pengembalian kredit pada tahun 2009 sebesar 0.24%, sedangkan tingkat kredit macet pada tahun 2009 sebesar 0.81%

Pengembalian kredit dianggap lalai jika selama 2 bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi. Tingkat kredit macet adalah jumlah kredit yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat ditagih kembali. Menurut laporan pengawas Koperasi Kredit Cempaka, indikator usaha yang baik dilihat dari rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan harus lebih kecil dari 5%

PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Pinjaman

a. Anggota mengisi Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan menyerahkan ke Panitia Kredit

Menurut penulis prosedur pengisian Surat Permohonan Pinjaman ini telah dilakukan namun memiliki kekurangan yaitu adanya informasi-informasi yang tidak diisi seperti kolom penghasilan. Padahal menurut penulis ini sangat penting, karena dari informasi penghasilan inilah panitia kredit dapat menganalisa kemampuan bayar dari peminjam. Walaupun pinjaman tersebut telah di beri angsuran yang nilainya cukup untuk menutup pinjaman, namun sebaiknya kolom ini tetap diisi dan sebaiknya di mintakan juga slip gaji atau bukti pendapatan lainnya (bila bukan karyawan) agar data yang tercantum dalam Surat Permohonan Pinjaman sesuai dengan realitas yang ada. Tentunya hal ini akan mengurangi peluang terjadinya kredit macet. Dari data yang ditemukan penulis juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kesalahan dalam kelalaian pengisian dokumen. Pada tahun 2007 sebesar 13,33%, tahun 2008 sebesar 10%, tahun 2009 sebesar 7,46%.

b. Berdasarkan SPP Panitia Kredit menganalisa (kemampuan pengembalian, jangka waktu, performa/profil anggota, dll) dan menyetujui melalui Surat Persetujuan Pinjaman (SPJ), mengoreksi atau menolak permohonan anggota.

Tujuan analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada koperasi secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan. Dalam pemberian kredit, koperasi menghadapi resiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada anggotanya. Oleh karena itu koperasi harus memantau keadaan dan perkembangan anggotanya yang meminjam terutama berkaitan dengan pelunasan pinjamannya agar dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan.

Dan juga panitia kredit harus memperhatikan TUKKERPAR, yaitu:

1. Tujuan Pinjaman

Tujuan pinjaman penting untuk diperhatikan. Karena tujuan utama dari koperasi adalah untuk membuat sejahtera seluruh anggotanya. Jadi jika tujuan peminjaman yang digunakan untuk membatu kesejahteraan anggota koperasi akan mendapat pertimbangan tertentu tanpa mengorbankan kepentingan anggota yang lainnya.

2. Kemampuan Mengembalikan



Kemampuan mengembalikan pin-jaman tentunya sangat penting untuk diperhatikan. Karena dengan ini koperasi dapat terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya gagal bayar. Koperasi juga merupakan suatu badan usaha yang mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatan peminjaman koperasi perlu untuk mengamankan modal mereka. Jadi setiap anggota yang meminjam harus sudah memiliki penghasilan sendiri baik sebagai pegawai atau wirausaha. Dan penghasilannya harus cukup untuk membayar angsuran pinjamannya kepada koperasi.

3. Kerajinan Menabung

Koperasi mengumpulkan dana anggotanya yang kemudian dana tersebut akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Maka dari itu kerajinan menabung sangat penting bagi koperasi sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan panitia kredit dalam memberikan kredit. Karena tanpa adanya kerajinan menabung dari anggotanya maka usaha pokok koperasi kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

4. Prestasi Masa Lalu

Koperasi juga memperhatikan prestasi masa lalu dari anggota yang meminjam. Contohnya adalah dengan melihat tingkat kepatuhan anggota dalam melunasi pinjamannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian atau seringkali menunggak pembayaran cicilan.

5. Partisipasi dalam Kegiatan Koperasi Kredit Padat Asih

Partisipasi dalam kegiatan koperasi juga sangat penting. Koperasi hanya dapat berkembang bila anggotanya ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan koperasi. Karena melalui partisipasi anggota maka koperasi dapat mengetahui kelemahan dan kekuatannya sehingga menjadi pedoman untuk selalu memperbaiki diri dalam melayani anggotanya.

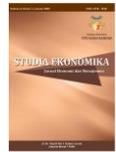
Jika dilihat dari tingkat kredit bermasalah dan kredit macet yang cenderung menurun maka penulis berkesimpulan bahwa panitia kredit telah menganalisis dengan cukup baik terutama dalam tahun 2009 yang mencapai tingkat kelalaian hanya sebesar 0.24% dan tingkat kredit macet sebesar 0.81%. Jadi prosedur analisa pinjaman yang dimiliki Koperasi Padat Asih telah cukup baik.

- c. Jika disetujui maka meneruskan arsip SPP dan SPJ ke bendahara/manajer untuk diproses lebih lanjut (diatur *cash flow*-nya untuk menentukan kapan dana dapat dicairkan)

Dalam menyetujui pinjaman, manajer memperhatikan *cash flow* yang dimiliki koperasi dan mengecek ketersediaan uang *cash* pada saat diterimanya Surat Permohonan Pinjaman dan Surat Persetujuan Pinjaman serta menentukan kapan pinjaman tersebut dapat diambil oleh anggota peminjam. Menurut penulis proses ini telah dilakukan dengan baik karena dari pengecekan yang dilakukan, pinjaman dapat dicairkan dengan cepat yaitu kurang dari 2 hari sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini juga menandakan bahwa pengaturan *cash flow* di koperasi sudah cukup baik.

- d. Bendahara/manajer menyiapkan Surat Perjanjian Pinjaman (SP) dan jika perlu meminta jaminan dari anggota. SPP dan SPJ diarsip oleh bendahara/ manajer.

Jaminan itu dapat berupa sertifikat tanah/rumah dengan acuan NJOP, Sertifikat deposito, BPKB motor, BPKB Mobil, Simpanan keluarga inti di kopdit Padat Asih, jaminan institusi/lembaga. Jaminan institusi/lembaga adalah suatu surat pernyataan dari pihak peminjam bahwa pihak koperasi bisa langsung memotong gajinya untuk membayar pinjaman apabila terjadi kredit macet. Jaminan ini hanya berlaku untuk karyawan yang bernaung dibawah Yayasan Bunda Hati Kudus. Menurut penulis prosedur ini telah dilakukan dengan baik dan semua Surat Perjanjian Pinjaman



memiliki materai cukup. Dalam meminta jaminan, koperasi Padat Asih juga telah memiliki pola kebijakan yang mengaturnya sehingga memudahkan panitia kredit dalam menentukan perlu atau tidaknya jaminan tersebut. Walaupun masih ada masalah dalam menentukan nilai jaminan yang dijamin.

- e. Setelah dana siap, bendahara/manajer menyerahkan Surat Perjanjian Pinjaman dan jadwal ke kasir untuk ditindaklanjuti.

Menurut penulis prosedur ini telah dilakukan dengan baik dilihat dari waktu yang diperlukan kasir untuk mencairkan pinjaman cukup singkat bahkan bila tidak terlalu besar pinjaman dapat dicairkan dalam hari yang sama.

- f. Kasir meminta anggota menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman, Slip Uang Keluar (SUK), dan menyerahkan uang ke anggota.

Setelah menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman diatas materai dan Slip Uang Keluar maka kasir sudah bisa menyerahkan uang kepada anggota yang meminjam. Menurut penulis prosedur ini telah dilakukan dengan baik yaitu dengan ditandatanganinya semua Surat Perjanjian Pinjaman diatas materai dan Slip Uang Keluar oleh anggota.

- g. Kasir mencatat di BKH, menyerahkan copy 1 ke anggota mengarsip SP dan copy 2 SUK serta dan menyerahkan asli SUK ke akuntansi.

Setelah menyerahkan uang kepada anggota, kasir lalu mencatat transaksi tersebut kedalam Buku Kas Harian. Kasir juga mendistribusikan dokumen yang ada padanya seperti mengarsip *copy 2* Slip Uang Keluar dan Surat Perjanjian Pinjaman, menyerahkan *copy 1* Slip Uang Keluar kepada Anggota yang meminjam, serta menyerahkan Slip Uang Keluar asli ke bagian akuntansi. Menurut penulis prosedur ini telah dilakukan dengan baik yaitu dengan lengkapnya semua Surat Perjanjian Pinjaman dan *copy 2* Slip Uang Keluar dalam arsip persetujuan kredit.

2. Tingkat kelalaian pengembalian kredit

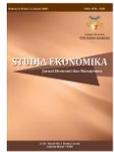
Jika dilihat dari persentase kredit macet yang terjadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2009, dengan tingkat kelalaian sebesar 0.24%. dengan data ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem operasi prosedur yang ada di koperasi telah cukup baik dan telah dilaksanakan dengan baik pula. Pada tahun 2009 pengurus Koperasi Padat Asih telah memutuskan untuk menggunakan jasa seorang manajer koperasi. Operasional koperasi yang sebelumnya hanya dua orang staf operasional kini telah bertambah menjadi seorang manajer koperasi dan dibantu empat orang stafnya. Tentunya hal ini sangat berpengaruh secara positif terhadap kinerja operasional koperasi Padat Asih. Sehingga koperasi mampu melakukan pengawasan terhadap kredit dengan lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemeriksaan operasional memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pelaksanaan Standar Operasi Prosedur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelalaian Pelaksanaan Standar Operasi Prosedur yang dilakukan dari tahun 2007 (sebesar 13,33%) terus menurun dibandingkan dengan kelalaian pada tahun 2009 (sebesar 7,46%). Kelalaian-kelalaian tersebut meliputi, tidak diisinya informasi pendapatan dan dokumen yang terkait dari anggota yang meminjam.



-
2. Pemeriksaan operasional mem-pengaruhi standar operasi prosedur persetujuan kredit dalam hal penambahan atau pengurangan prosedur persetujuan kredit yang sudah ada. Dalam rentang tahun 2007-2009 tidak ada penambahan pasal/prosedur yang berlaku di koperasi Padat Asih. Sehingga penulis berpendapat bahwa pemeriksaan operasional tidak mempengaruhi standar operasi prosedur persetujuan kredit.
 3. Pemeriksaan operasional mem-pengaruhi efektivitas pelaksanaan kredit terlihat dari persentase tingkat kelalaian dan kredit macet yang terjadi di Koperasi Padat Asih pada rentang waktu 2007-2009. Tingkat kelalaian tahun 2007 adalah 2.05% sedangkan 2008 adalah 4.45% dan tahun 2009 adalah 0.24%. dapat dilihat telah terjadi penurunan tingkat kelalaian dalam pembayaran kredit di tahun 2009. Sedangkan untuk tingkat kredit macet yang terjadi tahun 2007 sebesar 1.96%, sementara untuk tahun 2008 sebesar 1.55% dan untuk tahun 2009 sebesar 0.81%. sedangkan dari penurunan jumlah kelalaian dalam pengisian dokumen persetujuan kredit ditahun 2007 sebesar 13,33%, tahun 2008 sebesar 10%, tahun 2009 sebesar 7,46%. Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan kredit.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk Koperasi dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Saran untuk koperasi
 - a. Agar diperhatikan kelengkapan dalam pengisian formulir Surat Permohonan Pinjaman terutama dalam keterangan penghasilan. Sebaiknya pengisian kolom ini disertai bukti-bukti yang memadai seperti slip gaji atau dokumen pendukung lainnya.
 - d. Perlu dilakukan pelatihan kepada Pengurus maupun staf yang ada dalam menentukan nilai pasar dari suatu jaminan. Hal ini penting agar pinjaman yang diberikan kepada anggota tidak melebihi nilai jaminannya. Sehingga jika terjadi gagal bayar dikemudian hari oleh anggota pinjaman tersebut tetap dapat dilunasi dengan jaminannya.
 - e. Perlu adanya pemeriksanaan operasional yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mening-katkan efektivitas pelaksanaan kredit pada khususnya.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
 - a. Perlu diteliti apakah terjadi praktek manajemen laba dalam pelaporan keuangan yang dilakukan pengurus.
 - b. Melakukan penelitian tentang pemeriksaan operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Rumah Tangga Kopdit Padat Asih
Bayangkara, IBK, 2008. *Audit Manajemen Prosedur dan implementasi*, Salemba Empat, Jakarta
Divianto, 2012. *Peranan audt operasonal terhadap efektfitas pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
Hiro Tugiman, 2001. *Standar Profesional Audit Internal*, edisi kelima, Kanisius, Yogyakarta
Husni Rhamdani, Rahmatulaoh, 2012. *Pengaruh audit operasional dan pengendalian intern terhadap efisiensi biaya produksi*, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
Mulyadi, 2002. *Auditing*, buku 1, edisi keenam, Salemba Empat, Jakarta



-
- Prayogo, Suryo, 2009. *Analisa dan dampak krisis global terhadap perbankan syariah*, suryodesign.wordpress.com, Jakarta
- Riduwan, 2004. *Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta
- Rivai, Veithzal, 2007. *Credit Management Handbook*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rosidah, Eus & prihady, 2008. *Peranan audit operasional dalam menunjang pengendalian intern atas biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) komoditi teh*, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
- Sumarsono, Sonny, 2003. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suyatno, Thomas, 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tjoekam, Moh, 2001. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia ElexMedia komputindo, Jakarta
- Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang koperasi No.25 tahun 1992 Pasal 1
- Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Yunior, Khomeiny, 2008. *Pengaruh Pemeriksaan Interen Terhadap Efektivitas Pengendalian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Kantor Wilayah I Medan*, www.researchgate.net, Medan